

Pengaruh Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2015 – 2024.

Vivi Adeyani Tandean¹, Sutrisno²
STIE Wiyatamandala-¹vivi.tandean@gmail.com
-²sutrisno@wym.ac.id

Abstract-This study aims to examine the effect of the disbursement of Revenue-Sharing Funds (DBH) and General Allocation Funds (DAU) on the Human Development Index (HDI) from 2015 to 2024 in Indonesia, both partially and simultaneously. The method used was multiple regression analysis with data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Indonesian Ministry of Finance, which was then processed using IBM SPSS Statistics 22 for Windows. The results of the study indicate that DBH disbursements have a significant effect on the HDI, whereas DAU disbursements do not have a significant effect on the HDI. This study provides evidence that DBH disbursements are a concrete manifestation of fiscal transfers from the central government to the regions and are used to finance basic service programs that support HDI improvement, such as education, health, and economic infrastructure.

Keyword : DBH, DAU, IPM

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa (Kementerian Keuangan RI, 2026). Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah, sekaligus mendorong pemerataan kualitas layanan publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). DBH dialokasikan berdasarkan kepada kontribusi penerimaan suatu daerah dengan prinsip untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal, sedangkan DAU dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Kedua instrumen ini secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terutama pada Tingkat daerah, yang menjadi salah satu indikator utamanya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan realisasi TKD yang didalamnya DBH dan DAU menjadi dua komponen terbesar menunjukkan adanya tren peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2022 realisasi TKD tercatat sebesar Rp704,78 triliun meningkat menjadi sebesar Rp814 triliun pada alokasi APBN 2023 dengan komposisi DBH sebesar Rp205,67 triliun dan DAU sebesar Rp398,03 triliun (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Pada tahun 2024, alokasi DAU kembali dinaikkan menjadi Rp429,21 triliun, tumbuh 7,42 persen dari tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Besarnya alokasi dan realisasi TKD tersebut diharapkan mampu berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah, yang salah satu menjadi indikator utamanya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia meningkat dari 72,81 pada tahun 2020 menjadi 73,16 (2021), 73,77 (2022), 74,39 (2023), 75,02 (2024), dan 75,90 pada tahun 2025 (BPS, 2025). Apabila dicermati dari laju pertumbuhannya, kenaikan IPM hanya berkisar antara 0,48 persen hingga 1,17 persen per tahun, angka yang relatif kecil dan cenderung menunjukkan stagnan dibandingkan dengan lonjakan nominal TKD yang bahkan tumbuh dua digit pada beberapa tahun anggaran. Kesenjangan (*gap*) antara skala fiskal yang terus membesar dengan capaian pembangunan manusia yang bertumbuh lambat inilah yang menjadi titik tolak permasalahan dalam penelitian ini.

Fenomena tersebut semakin diperkuat dengan adanya temuan bahwa realisasi dari belanja daerah justru tidak berjalan beriringan dengan besarnya dana yang telah ditransfer. Kementerian Keuangan mencatat bahwa per akhir Agustus 2025 dana milik pemerintah daerah yang masih mengendap di rekening perbankan mencapai Rp233,1 triliun, sementara belanja daerah pada periode yang sama justru berkontraksi 13,1 persen (Media Keuangan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan pada sisi penyerapan dan efektivitas pemanfaatan TKD oleh pemerintah daerah, bukan semata pada besaran alokasinya. Studi terdahulu juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan dana transfer dengan IPM: Patadang, Rotinsulu, dan Rorong (2021) misalnya menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Minahasa Tenggara, sementara Suhyanto, Juanda, Fauzi, dan Rustiadi (2020) menemukan bahwa skor IPM Provinsi Jawa Barat secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional meskipun dana transfer daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Perbedaan hasil penelitian (*research gap*) tersebut, ditambah dengan kesenjangan fiskal-hasil (*fiscal-outcome gap*) yang tampak pada data makro nasional, menjadikan topik pengaruh alokasi dan realisasi TKD terhadap IPM relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mencakup rentang waktu terkini tahun 2020 hingga 2025 yang meliputi periode pemulihan pascapandemi Covid-19 serta era kebijakan efisiensi anggaran.

Di sisi lain, pertumbuhan IPM nasional relatif tidak sebanding dengan besarnya kenaikan nominal transfer fiskal tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia hanya bergerak dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 75,02 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan pada periode 2020–2024 sebesar 0,75 persen dan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 0,85 persen—capaian yang justru disebut sebagai percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode 2020–2023 yang hanya 0,72 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Artinya, meski transfer fiskal ke daerah tumbuh dua digit dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan IPM justru bergerak di bawah satu persen per tahun.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa catatan dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya (Muhajirin&Panorama, 2017). Data sekunder yang digunakan berupa data realisasi DBH dan BAU yang disajikan oleh Kementerian Keuangan dan data IPM yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berdasarkan deret waktu (*time series*) yang diambil dari periode sepuluh tahun terakhir yaitu. 2015-2024.

Pendekatan penelitian kuantitatif bersifat konfirmasi karena berfokus pada pengujian hipotesis dan teori. Dalam aktivitas penelitian, seorang peneliti menyatakan hipotesis terlebih dahulu, kemudian mengujinya dengan data empiris untuk melihat apakah hipotesis tersebut didukung (Johnson & Christensen, 2014). Metode penelitian ini menjadi primadona dalam penelitian sejak abad 19 hingga sepanjang abad 20.

Metode ini didasarkan pada pandangan postpositivist (John W. Creswell & Creswell, 2018). Teknik Analisa dalam penelitian adalah menggunakan Analisa regresi berganda.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis dan berurutan. Pertama, peneliti melakukan analisis pengujian asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat kelayakan analisis. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu IPM. Setelah model regresi diperoleh, dilakukan pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu, uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi harga saham. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan program Microsoft Excel untuk pengelolaan data awal dan program IBM SPSS Statistics sebagai alat analisis statistik penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.85082318
Most Extreme Differences	Absolute	.166
	Positive	.166
	Negative	-.104
Test Statistic		.166
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikan (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi. Dengan demikian, model regresi dapat dianggap layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1(Constant)	68.254	.969		70.463	.000	
DBH	.032	.008	.745	4.072	.005	.920 1.087
DAU	4.244E-5	.000	.312	1.703	.132	.920 1.087

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF seluruh variabel < 10 dan tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Heterokedastisitas**Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t Sig.
1(Constant)	-4.129E-15	.969		.0001.000
DBH	.000	.008	.000	.0001.000
DAU	.000	.000	.000	.0001.000

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil uji heterokedastisitas diatas menggunakan uji *Glejser*. Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi untuk DBH (X1) sebesar 1.000 dan DAU (X2) adalah 1.000. Karena nilai signifikansi kedua variabel diatas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan Keputusan dalam uji *glejser*, dapat dsimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokolerasi**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Runs Test**

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	.03117
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	3
Z	-1.677

Asymp. Sig. (2-tailed).094

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi run test pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikan (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,094 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga model regresi dapat dianggap layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Kelayakan Model**Uji F (Simultan)****Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan) ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.661	2	11.831	12.711	.005 ^b
	Residual	6.515	7	.931		
	Total	30.177	9			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), DAU, DBH

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan tabel Anova diatas, di peroleh Fhitung sebesar 12,711 dengan nilai signifikansi adalah 0,005, sedangkan F tabel untuk $n = 10$ dan $k = 4$ ($df_1 = k-1 =$, $df_2 = n-k = 6$) adalah $F_{tabel} = 5,143$. Karena nilai Fhitung ($12,711$) $> F_{tabel}$ ($5,143$) dan nilai signifikansi ($0,005$) $> 0,05$ dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya variabel realisasi DBH dan realisasi DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.784	.722	.96474

a. Predictors: (Constant), DAU, DBH

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel Model Summary, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 72,2% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel Realisasi DBH dan Realisasi DAU, sedangkan sisanya sebesar 27,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square yang cukup tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis**Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial)**

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	68.254	.969		70.463	.000
DBH	.032	.008	.745	4.072	.005
DAU	4.244E-5	.000	.312	1.703	.132

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda pada tabel 7 diatas maka dapat ditanyakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 68,254 + 0,032X_1 + 4,344E-5X_2 + e$$

Dalam penelitian ini diketahui $n = 10$, $k = 3$, dengan derajat kebebasan ($df = 10 - 3 = 7$), sehingga didapat nilai t tabel adalah 2,36462. sehingga persamaan regresi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 68,254 dengan tanda positif yang berarti nilai konstanta variabel IPM adalah sebesar 68,254.
2. Realisasi DBH (X_1) memiliki t hitung sebesar 4,072 > t tabel 2,36462 dengan nilai signifikansi ($0,005 < 0,05$), sehingga realisasi DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia pada Tahun 2015 – 2024 dan menjadi salah satu factor yang menentukan kenaikan tingkat IPM di Indonesia.
3. Realisasi DAU (X_2) memiliki t hitung sebesar 1,703 < t tabel 2,36462 dengan nilai signifikansi ($0,132 > 0,05$), sehingga realisasi DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia pada Tahun 2015 – 2024 dan tidak menjadi satu factor

Pengaruh Realisasi DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa realisasi DBH (X_1) memiliki t hitung sebesar 4,072 > t tabel 2,36462 dengan nilai signifikansi ($0,005 < 0,05$), sehingga realisasi DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia pada Tahun 2015 – 2024. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin besar realisasi dari DBH maka akan semakin meningkatkan nilai IPM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal dimana DAU merupakan sebuah wujud konkrit dari transfer fiskal pusat ke daerah dan digunakan untuk membiayai program layanan dasar yang menopang peningkatan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil dari Patadang dkk (2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH

berpengaruh signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun melalui pengeluaran kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas dana transfer terhadap IPM sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan pada belanja sektor-sektor prioritas.

Pengaruh Realisasi DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa realisasi DAU (X_2) memiliki t hitung sebesar $1,703 < t \text{ tabel } 2,36462$ dengan nilai signifikansi $(0,132) > 0,05$, sehingga realisasi DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia pada Tahun 2015 – 2024. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arrosyid dan Bawono (2025) dimana DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi ketiga dana transfer tersebut masih terbatas dalam mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur dibandingkan PAD yang lebih fleksibel penggunaannya. Temuan ini menjadi salah satu dasar penting bagi orisinalitas penelitian ini, yang menguji ulang hubungan tersebut menggunakan data realisasi (bukan pagu) dan cakupan waktu yang jauh lebih Panjang (Arrosyid dan Bawono, 2025). Pada penelitian Ina dan Hudang (2024) juga menunjukkan hasil yang serupa dimana DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM sekaligus menguatkan temuan Williantara dan Budiasih (2016) yang menyatakan dana transfer tidak berpengaruh terhadap IPM. Studi Ina dan Hudang menegaskan pentingnya pengujian ulang pada konteks wilayah dan periode yang berbeda, mengingat karakteristik fiskal dan sosial-ekonomi setiap daerah tidak seragam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh realisasi DBH dan realisasi DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015 – 2024, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, realisasi DBH (X_1) memiliki t hitung sebesar $4,072 > t \text{ tabel } 2,36462$ dengan nilai signifikansi $(0,005) < 0,05$, sehingga realisasi DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia pada Tahun 2015 – 2024 dan menjadi salah satu factor yang menentukan kenaikan tingkat IPM di Indonesia. Kedua, realisasi DAU (X_2) memiliki t hitung sebesar $1,703 < t \text{ tabel } 2,36462$ dengan nilai signifikansi $(0,132) > 0,05$, sehingga realisasi DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia pada Tahun 2015 – 2024 dan tidak menjadi satu faktor yang menentukan kenaikan tingkat IPM di Indonesia. Dan ketiga, secara simultan, Realisasi DBH dan Realisasi DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia Tahun 2015 – 2024 yang memiliki nilai Fhitung sebesar 12,711 dengan nilai signifikansi adalah 0,005, sedangkan F tabel untuk $n = 10$ dan $k = 4$ ($df_1 = k - 1 = 3$, $df_2 = n - k = 6$) adalah F tabel = 5,143. Karena nilai Fhitung (12,711) $> F \text{ tabel } (5,143)$ dan nilai signifikansi $(0,005) < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 72,2% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel Realisasi DBH dan Realisasi DAU, sedangkan sisanya sebesar 27,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bagi pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kualitas transfer dana ke daerah (TKD) terutama bagi DBH dan DAU sehingga akan dapat meningkatkan IPM secara signifikan dengan cara menyalurkan DBH dan DAU secara tepat waktu sehingga TKD yang disalurkan bisa tepat sasaran dan terserap secara maksimal. Selain itu perlu diperkuat pada bagaian pengawasan dan evaluasi penggunaan DBH dan DAU agar semakin mempersempit adanya penyimpangan dan penyalagunaan anggaran DBH dan DAU. Bagi pemerintah daerah adalah memperkuat dan mengefektifkan pengelolaan DBH dan DAU untuk membiayai program-program yang secara langsung dapat meningkatkan IPM didaerahnya masing-masing. Hal tersebut bisa dimulai dari tahap perencanaan hingga pada pelaksanaan anggaran sehingga etiap dana yang diterima dapat segera dikonversi menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menggunakan jumlah observasi yang lebih besar, misalnya melalui data panel kabupaten/kota atau provinsi

sehingga mampu menggambarkan kondisi antarwilayah secara lebih komprehensif. Selain itu, periode penelitian dapat diperpanjang agar menghasilkan analisis yang lebih robust terhadap dinamika kebijakan transfer fiskal. Peneliti berikutnya juga disarankan menambahkan variabel lain yang secara teoritis berpotensi memengaruhi IPM, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Modal, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, maupun variabel tata kelola pemerintahan. Mengingat penelitian ini hanya mampu menjelaskan 72,2% variasi IPM, masih terdapat 27,8% variasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrosyid, C. F., & Bawono, A. D. B. (2025). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 880–889. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.5760>
- Creswell, John W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In SAGE Publications, Inc. (Fifth Edit). London EC1Y 1SP: SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2023. Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024. Kementerian Keuangan RI.
- Fathia, P. B., & Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., C. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=41626
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. In R. Hester, T. Accomazzo, L. Barrett, & P. L. Fleming (Eds.), SAGE Publications, Inc. (California). Singapore: Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781351004626-12>.
- Kementerian Keuangan RI. (2026, 30 Januari). Pemerintah dorong pertumbuhan ekonomi daerah: Realisasi Transfer ke Daerah per Desember 2025 capai Rp849,0 triliun atau 92,3 persen dari target APBN. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah:-realisasi-transfer-ke-daerah-per-desember-2025-capai-rp849,0-t-atau-92,3-persen-dari-target-apbn>
- Kementerian Keuangan RI. (2026, 30 Januari). Pemerintah dorong pertumbuhan ekonomi daerah: Realisasi Transfer ke Daerah per Desember 2025 capai Rp849,0 triliun atau 92,3 persen dari target APBN. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah:-realisasi-transfer-ke-daerah-per-desember-2025-capai-rp849,0-t-atau-92,3-persen-dari-target-apbn>
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.

- Media Keuangan. (2025, 16 Oktober). Kemenkeu dorong transfer daerah yang kuat dan tepat sasaran, realisasi capai Rp644,9 triliun. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemenkeu-dorong-transferdaerah-yang-kuat-dan-tepat-sasaran-realisasi-capai-rp6449-triliun>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara dengan pengeluaran di bidang kesehatan sebagai variabel intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132–149. <https://doi.org/10.35794/jpekd.35104.22.2.2021>
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(3), 285–305.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–11. www.bps.go.id
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044–2070.

